

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Bogdan & Taylor, 2010) metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata yang tertulis atau diungkapkan dari individu yang diperhatikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak berfokus pada ukuran populasi atau pemeriksaan, kedua hal tersebut bahkan sangat terbatas. Jadi data yang dikumpulkan mendalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak diperlukan mencari sampling lainnya. Penekanannya adalah kedalaman atau kualitas data, dibandingkan kuantitas data (Semiawan, 2019).

Penelitian kualitatif sering disebut penelitian *naturalistik*, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai teknik *etnografi*, karena pada mulanya lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang kajian social kemanusiaan; disebut juga metode deskriptif analitis, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya tingkah laku, pandangan, inspirasi, aktivitas dan lain-lain. Secara holistik, melalui uraian kata dan bahasa, dalam lingkungan alam tertentu dan menggunakan berbagai teknik ilmiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk berbagai pertimbangan.

Pertama, penelitian kualitatif lebih sederhana dengan mengelola berbagai faktor nyata; selain itu, penelitian ini menyajikan secara lugas gagasan tentang hubungan antara penelitan dan responden, dan ketiga adalah penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap banyak dampak bersama dan juga pola nilai yang dihadapi (Semiawan, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mengeksplorasi mendalam mengenai bagaimana teknologi dimanfaatkan oleh BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebagai strategi pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif pelaku, seperti manajemen BPRS, karyawan, dan nasabah, terkait pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi. Pendekatan Kualitatif dapat mengungkap pandangan, interpretasi, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi strategi tersebut. Pemanfaatan teknologi sebagai alat strategi melibatkan proses kompleks yang bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif dapat membantu menelusuri langkah-langkah, tantangan, dan inovasi dalam implementasi teknologi di BPRS.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian dilakukan di 6 cabang BPRS di Sumatera Utara dengan rincian BPRS sebagai berikut:

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian

No	Nama BPRS	Alamat
1	BPRS Al- Washliyah	Jl. Gunung Krakatau No.28, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238.
2	BPRS Amanah Bangsa	Jl. Medan - Pematang Siantar, Dolok Ulu, Kec. Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21154.
3	BPRS Amanah Insan Cita	JL. Williem Iskandar Komp. Mmtc Blok Aa-5 Medan Estate, KAB. Deli Serdang
4	BPRS Gebu Prima	Jl. AR. Hakim/ Bakti no.139B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
5	BPRS Puduarta Insani	Jl. Besar Tembung No.13 A, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.
6	BPRS Sindanglaya	Jl. Perintis Kemerdekaan No 14 A Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

[illegible]

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Rukin, 2022). Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pemahaman informan tersebut terhadap syariah. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang, dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap cukup berkompeten dalam memberikan pendapat tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam analisis ANP, jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar ekonomi Islam dan praktisi/profesional yang berkecimpung dalam BPRS. Adapun informan yang dijadikan narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Informan/Responden Penelitian

No	Inisial Informan	Pekerjaan	Waktu
1	Dr.Dedi Iskandar BB	Komut BPRS Al- Washliyah	15 Januari 2025
2	Syawal Fery, ME	Dirut BPRS Amanah Bangsa	28 Januari 2025
3	Andri Setiawan	Dirut BPRS Amanah Insan Cita	29 Januari 2025
4	Indri Pratiwi	Dirut BPRS Gebu Prima	30 Januari 2025
5	Mailiswarti, ME	Dirut BPRS Puduarta Insani	31 Januari 2025

6	Wina	Dirut BPRS Sindanglaya	31 Januari 2025
7	Dr.H.Arso, MA	Dewan Pengawas Syariah	5 Februari 2025
8	Prof.Saparuddin S.	Dosen	7 Februari 2025
9	Rikhi Rinanda	Pakar Digital	9 Februari 2025
10	Abdul Muin Akmal P.	OJK	12 Februari 2025
11	Cahyo Kartiko	Praktisi Perbankan Syariah	15 Februari 2025

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau pihak dari mana data penelitian diperoleh (Suharsimi, 2002). Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni individu atau perseorangan yang terlibat secara langsung dalam objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016), data primer merupakan data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengalaman lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi di enam BPRS yang beroperasi di Sumatera Utara dengan cara sebagai berikut:

a) *Focus Group Discussion* (FGD)

Mengumpulkan pandangan dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan seperti pengelola BPRS, nasabah, dan regulator. FGD dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digunakan dalam strategi pengembangan BPRS.

b) *In-depth Interview*

Melakukan wawancara mendalam dengan individu kunci, seperti manajer BPRS, ahli teknologi informasi, dan nasabah untuk mendapatkan informasi tentang penerapan teknologi dan dampaknya terhadap pengembangan BPRS.

c) Survei Nasabah

Menyebarkan kuesioner kepada nasabah untuk mengumpulkan data tentang penggunaan teknologi dalam layanan BPRS, kepuasan nasabah, dan preferensi mereka terhadap produk yang ditawarkan.

d) Observasi Langsung

Mengamati langsung proses operasional di BPRS, termasuk penggunaan teknologi dalam transaksi dan interaksi dengan nasabah, untuk memahami secara praktis bagaimana teknologi diterapkan dalam strategi bisnis.

e) Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait seperti laporan tahunan, kebijakan internal mengenai penggunaan teknologi, dan materi pemasaran yang menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk menarik nasabah baru

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan peneliti sebagai pelengkap dalam proses analisis lebih lanjut (Semiawan, 2019). Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan

melalui pihak atau dokumen tertentu. Contoh data sekunder antara lain berupa hasil dokumentasi, buku, arsip, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti :

a) Laporan Tahunan BPRS

Laporan tahunan dari berbagai BPRS di Sumatera Utara yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan, strategi pengembangan, dan penggunaan teknologi dalam operasional mereka.

b) Dokumen Kebijakan dan Regulasi

Dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait lainnya yang mengatur operasional BPRS, termasuk regulasi mengenai pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah.

c) Studi Kasus dan Penelitian Sebelumnya

Literatur akademik dan studi kasus yang membahas penerapan teknologi di BPRS lain, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan layanan nasabah. Misalnya, penelitian yang menunjukkan bagaimana teknologi informasi meningkatkan efisiensi operasional di BPRS.

d) Data Statistik Sektor Perbankan

Data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau OJK mengenai pertumbuhan sektor perbankan syariah, khususnya BPRS, serta tren penggunaan teknologi dalam industri perbankan.

e) Artikel dan Jurnal Ilmiah

Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah mengenai inovasi teknologi di sektor perbankan syariah dan dampaknya terhadap

pengembangan lembaga keuangan mikro seperti BPRS.

f) Dokumen Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu yang mengkaji adopsi teknologi informasi di lembaga keuangan, termasuk analisis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kinerja karyawan dan pelayanan nasabah.

Data sekunder tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan landasan teoritis yang komprehensif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan akurat. Oleh sebab itu, pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan fokus, pendekatan, serta kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa berpindah dari suatu objek, dengan tujuan melihat dan memahami secara seksama aktivitas yang dilakukan oleh objek tersebut. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Seperti halnya penelitian kualitatif pada umumnya, observasi berfokus untuk mendeskripsikan serta memahami penelitian secara lebih mendalam. Yang diamati dalam penelitian ini hadir dalam dua bentuk, yaitu interaksi dan percakapan. Artinya, selain perilaku nonverbal, observasi juga mencakup perilaku

verbal yang ditunjukkan oleh individu yang diamati (Rachmat, 2012)

Dalam hal ini, peneliti secara langsung akan melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi pengembangan BPRS di Sumatera Utara pada era digital, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a) Penggunaan Teknologi dalam Operasional dengan cara mengamati bagaimana teknologi diterapkan dalam proses operasional BPRS, seperti sistem informasi manajemen, aplikasi perbankan, dan alat pembayaran digital.

b) Interaksi dengan Nasabah

Memperhatikan bagaimana cara nasabah berinteraksi dengan teknologi yang disediakan oleh BPRS, termasuk penggunaan aplikasi mobile banking atau layanan online lainnya.

c) Proses Pemberian Pembiayaan.

Melakukan observasi prosedur pemberian pembiayaan, termasuk penggunaan sistem berbasis teknologi untuk analisis kelayakan pembiayaan dan proses persetujuan.

d) Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

mengamati program pelatihan yang diberikan kepada karyawan mengenai penggunaan teknologi baru dan bagaimana mereka menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

e) *Feedback* dari Nasabah

mengumpulkan informasi tentang bagaimana nasabah memberikan umpan balik terhadap layanan berbasis teknologi yang disediakan oleh BPRS.

f) Infrastruktur Teknologi

Melakukan pemeriksaan infrastruktur teknologi yang digunakan, seperti jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mendukung operasional BPRS.

g) Implementasi Strategi Digital

Mengamati bagaimana strategi digital diimplementasikan dalam kegiatan pemasaran dan promosi produk BPRS.

2. Wawancara

Proses interaksi dan komunikasi merupakan wawancara. Hasilnya ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang dituangkan dalam daftar pertanyaan, dan suasana atau situasi wawancara. Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapat data) dan informan (seseorang yang diharapkan mempunyai data) penting tentang suatu objek. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Semiawan, 2019). Wawancara dalam riset kualitatif sebagai wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive interview*) dan umumnya tidak berstruktur. Intinya adalah untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam (Sujarweni, 2015).

Peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Manajer dan Staf BPRS, Kepala Divisi Teknologi, dan staf yang terkait dengan implementasi

teknologi serta kepada nasabah Untuk memahami pengalaman dan persepsi nasabah tentang pemanfaatan teknologi dalam layanan BPRS

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data, bertujuan memperoleh data yang mendukung analisis dan interpretasi data (Sujarweni, 2015). Studi dokumen sangat penting dalam analisis isi. Dalam studi dokumen, jika ada kesalahan tentang data, masih dapat diperiksa, karena dokumen adalah benda mati yang tidak akan berubah (Karya et al., 2024). Beberapa data yang paling penting untuk didokumentasikan meliputi:

- a) Dokumen Kebijakan dan Prosedur meliputi Kebijakan internal BPRS mengenai penggunaan teknologi dan Prosedur operasional standar (SOP) terkait penerapan teknologi dalam layanan.
- b) Laporan Keuangan meliputi Laporan tahunan yang mencakup data keuangan dan investasi dalam teknologi dan Analisis dampak teknologi terhadap kinerja finansial BPRS.
- c) Dokumentasi Proyek Teknologi meliputi Rencana dan laporan proyek implementasi teknologi, termasuk anggaran dan hasil evaluasi dan Deskripsi sistem informasi yang digunakan, seperti *Core Banking System* (CBS).
- d) Data Statistik dan Survei meliputi Statistik mengenai adopsi teknologi di BPRS, termasuk jumlah nasabah yang menggunakan layanan digital dan Hasil survei kepuasan nasabah terkait layanan berbasis teknologi.

- e) Umpan Balik Nasabah meliputi Dokumen yang mencatat umpan balik dari nasabah tentang layanan berbasis teknologi dan Hasil survei atau wawancara yang menunjukkan kepuasan nasabah terhadap layanan digital.
- f) Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Dokumen perjanjian kerjasama dengan penyedia teknologi atau lembaga lain dan Laporan hasil kerjasama yang menunjukkan dampak pada pengembangan BPRS.
- g) Analisis Risiko dan Kepatuhan meliputi Dokumen analisis risiko terkait penerapan teknologi baru dan Laporan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penggunaan teknologi di sektor perbankan.
- h) Infrastruktur Teknologi terdiri dari Dokumentasi mengenai infrastruktur IT yang digunakan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dan Data tentang kesiapan infrastruktur untuk mendukung layanan digital.

F. Teknik Analisis Data

Untuk penelitian dengan metode kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan (Sugiyono, 2016). Analisis sebelum di lapangan yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi penelitian terdahulu (data sekunder) yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sementara, analisis selama di lapangan terdiri dari reduksi data yang berarti penulis merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu.

Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak dapat menjawab

rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti mengetahui kondisi lapangan. Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga adalah kualitatif deskriptif, sementara untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu ANP.

1. Gambaran Umum ANP

Data Metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian adalah *metode Analytic Network Process* (ANP). ANP merupakan pengembangan dari metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). ANP merupakan teknik pengambilan keputusan terhadap suatu masalah (Saaty, 2004). *Analytic Network Process* (ANP) merupakan generalisasi dari *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dengan mempertimbangkan ketergantungan antara unsur-unsur hirarki. Banyak masalah keputusan tidak dapat terstruktur secara hirarki karena mereka melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen-tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki pada elemen-tingkat yang lebih rendah (Saaty & Vargas, 2013).

ANP merupakan metode dengan pendekatan dimana data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis tidak tersedia, sehingga peneliti harus mencari data primer. ANP merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah

faktor-faktor dalam jaringan (Jharkharia & Shankar, 2017). Metode ANP terdiri dari tiga langkah, pertama yaitu dengan depth interview ke para pakar, praktisi dan regulator untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh. Kedua, hasilnya digunakan untuk mengembangkan jaringan ANP yang tepat kemudian untuk penyusunan kuesioner. Ketiga, analisis ANP diaplikasikan untuk membuat alternatif solusi prioritas dan kebijakan strategis (Mulawarman, 2023).

2. Landasan ANP

Menurut (Jharkharia & Shankar, 2017) ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:

- a) Respirokal, aksioma ini menyatakan bahwa jika $PC(EA, EB)$ adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB, EA) = 1/PC(EA, EB)$. Misalkan jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya $1/5$ dari besar A.
- b) Homogenitas, menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
- c) Prioritas, yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval (0,1) dan ukuran dominasi relatif.

- d) *Dependence condition*, diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

Tabel 3.4 Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

<i>No</i>	<i>Definition</i>	<i>Intencity of Importance</i>
1	<i>Extreme Importance</i>	9
2	<i>For Compromises Between The Above Values</i>	8
3	<i>Very Strong And Demonstrated Importance</i>	7
4	<i>For Compromises Between The Above Values</i>	6
5	<i>Strong Importance</i>	5
6	<i>For Compromises Between The Above Values</i>	4
7	<i>Moderate Importance</i>	3
8	<i>For Compromises Between The Above Values</i>	2
9	<i>Equal Importance</i>	1

Tabel 3.5 Penjelasan Skala ANP

No	Defenisi	Penjelasan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen sama pentingnya dalam hal prioritas masalah dan solusi penerapan branchless banking pada perbankan syariah
3	Agak Lebih Penting	Elemen yang satu agak lebih penting di atas elemen lainnya dalam hal prioritas masalah dan solusi penerapan branchless banking pada perbankan syariah
5	Lebih Penting	Elemen yang satu lebih penting di atas elemen lainnya dalam hal prioritas masalah dan solusi

		penerapan branchless banking pada perbankan Syariah
7	Sangat Lebih penting	Elemen yang satu amat lebih penting di atas elemen lainnya dalam hal prioritas masalah dan solusi penerapan branchless banking pada perbankan syariah
9	Tingkat yang paling ekstrem untuk ukuran sangat penting	Elemen yang satu memiliki tingkat kepentingan paling ekstrem dibandingkan elemen lainnya dalam hal prioritas masalah dan solusi penerapan branchless banking pada perbankan Syariah
2,4,6, dan 8	Nilai tengah antara dua keputusan yang berdekatan	
Berbalikan	Jika elemen x mempunyai nilai kepentingan lebih tinggi dari y, maka y memiliki nilai berbalikan jika dibandingkan dengan x	
Rasio	Rasio yang didapat langsung dari pengukuran	

3. Prinsip Dasar ANP

Prinsip-prinsip dasar ANP terdiri dari tiga prinsip, yaitu dekomposisi, penilaian komparasi dan komposisi hierarki atau sintesis dari prioritas (Refky Fielnanda, 2016):

- a) Prinsip dekomposisi, diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan cluster, sub-cluster, sub-sub cluster dan seterusnya. Dengan kata lain dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.

- b) Prinsip penilaian komparasi, diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (pairwise comparison) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam cluster dilihat dari cluster induknya. Perbandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam suatu cluster dilihat dari cluster induknya
- c) Prinsip komposisi hierarki atau sintesis, diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas “global” dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah.

4. Tahapan Metode ANP

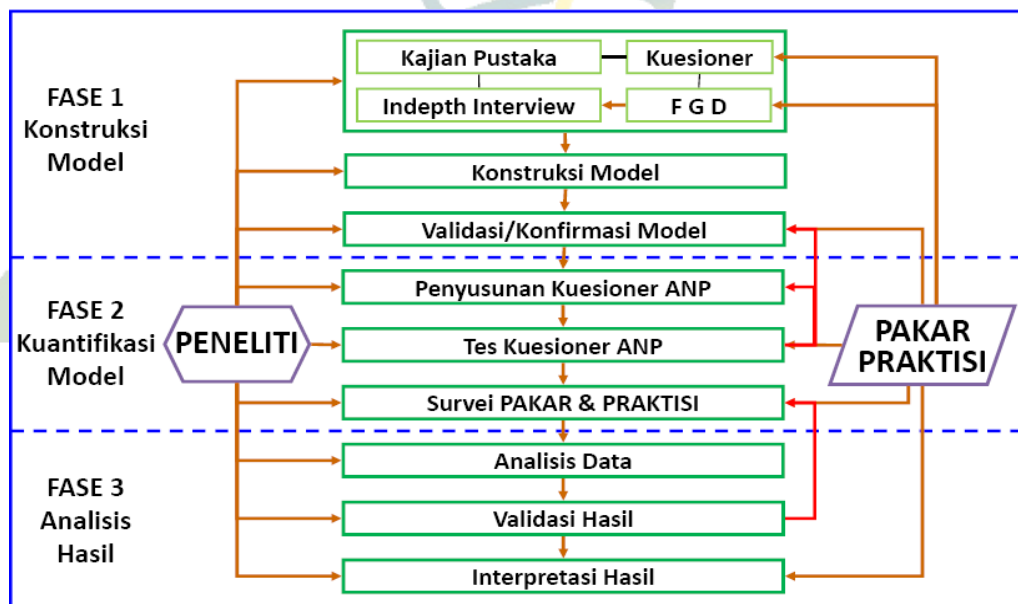
Tahapan pada metode ANP antara lain (Ascarya, 2015):

- a) Konstruksi Model Konstruksi model ANP dalam bentuk hierarki jaringan disusun berdasarkan acuan teoritis dan empirik dari presepsi dan pandangan para pakar, regulator dan praktisi bank syariah melalui wawancara terfokus guna mengkaji permasalahan yang aktual terkait penerapan branchless banking pada perbankan syariah.
- b) Kuantifikasi Model Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses

sehingga menghasilkan output berbentuk supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri.

Analytic Network Process (ANP) memiliki tiga tahapan kerja, yaitu: membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model, dan sintesis dan analisis. Tiga tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian



5. Sintetis dan Analisis

Langkah selanjutnya adalah sintesis hasil. Kuisisioner yang telah diisi responden dilakukan input pada software Super Decision. Sebelum data terolah dianalisis, dilakukan validasi data dengan melakukan uji konsistensi. Data yang dianggap konsisten apabila consistency ratio (CR) lebih kecil dari 10% atau 0,1. Jika nilai rasio konsistensinya di atas 10% atau $CR > 1$, maka dianggap terjadi inconsistency. Solusi yang dilakukan adalah mengulang

penilaian (judgement) dari informan atau responden. Jika jawaban yang diberikan telah konsisten, maka bobot prioritas elemen telah dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil (Nurul Huda & Team, 2015).

Bobot prioritas yang sudah memenuhi syarat dalam konsistensi, kemudian dicari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Hasil yang sudah ada dihitung nilai Kendall's Coefficient of Concordance untuk menghitung nilai kesepakatan antara responden (*rater agreement*). Kendall's Coefficient of Concordance adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesepakatan di antara beberapa pemberi nilai (judges) yang memeriksa atau menilai sekumpulan obyek yang diberikan. Adapun rumus Kendall's Coefficient of Concordance adalah (Pierre Legendre, 2015) :

$$W; 0 < W \leq 1$$

Ket :

Jika $W = 1$, maka hal tersebut menunjukkan kesesuaian sempurna, sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian jawaban antar responden atau jawaban responden tersebut bervariasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai *rater agreement* antara responden adalah :

- 1) Membuat transpose hasil matrik yang diperoleh dari seluruh responden pada setiap klaster.
- 2) Membuat ranking pada setiap penilaian responden.
- 3) Menghitung nilai W (*rater agreement*).

Rumus menghitung rater agreement (W)

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p) / p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S / \text{MaxS}$$

Keterangan :

P : node atau pernyataan

T : total ranking prioritas per node/pernyataan dari seluruh responden

n : responden ke-

Setelah dilakukan sintesis hasil, maka langkah terakhir adalah interpretasi hasil penelitian untuk ditarik suatu kesimpulan. Waktu yang digunakan untuk melakukan tiga tahapan penelitian di atas dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tahapan Penelitian	Kegiatan	Waktu
Konstruksi Model	Kajian Pustaka	1 Sep - 30 Des 2024
	<i>Indepth Interview</i>	1 Jan - 14 Jan 2025
	Konstruksi Model	15 jan - 28 Feb 2024
	Validasi Model	1 Mar - 12 Mar 2024
Kuantifikasi Model	Penyusunan Kuisisioner	13 Mar - 20 Mar 2025
	Tes Kuisisioner	21 Mar – 28 Mar 2025
	Survei Informan	29 Mar – 6 Aprl 2025

Sintesis dan Analisis	Validasi Data	6 April - 10 April 2025
	Bobot Prioritas	10 April - 15 April 2025
	Analisis Data	16 April - 20 April 2025
	Interpretasi Hasil	21 April - 30 April 2025

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian, uji keabsahan data sering kali difokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai standar validitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Uji validitas dalam penelitian ini meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan menyiratkan bahwa peneliti kembali dengan sumber-sumber data, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber yang telah ditemui sebelumnya, serta mencari narasumber baru. Fokus utama dari perpanjangan pengamatan adalah menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Peneliti perlu

memverifikasi apakah data tersebut masih relevan dan akurat setelah dilakukan pengecekan kembali di lapangan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan tekun. Peneliti akan memperluas pandangannya melalui Al-qur'an dan hadis, buku-buku maupun jurnal terkait Pemanfaatan Teknologi Sebagai Alat Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara Di Era Digital. Peneliti akan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Ketekunan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dari fenomena yang diteliti dicatat dan dianalisis dengan baik

3. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dilakukan dengan cara benar-benar menelaah informasi dari berbagai sumber, dengan metode yang berbeda, serta pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011). Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui beragam sumber dan metode, sehingga dapat meningkatkan validitas penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengecek informasi dari narasumber yang berbeda, yaitu pegawai dan nasabah BPRS di Sumatera Utara, melalui metode wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi. Selain itu, triangulasi waktu juga diterapkan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, mengingat kondisi dan situasi yang bervariasi dapat memengaruhi keabsahan data yang diperoleh.

Peneliti akan melakukan pengecekan data secara cermat untuk memastikan bahwa rumusan masalah tersusun secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan fokus penelitian.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Peneliti menggunakan rekaman wawancara serta melakukan analisis terhadap dokumentasi berupa foto-foto kegiatan terkait pemanfaatan teknologi sebagai strategi pengembangan BPRS di Sumatera Utara pada era digital. Dokumentasi ini mencakup foto-foto pelatihan penggunaan teknologi baru bagi karyawan BPRS, seperti pelatihan sistem perbankan digital dan aplikasi *mobile banking*, serta pengambilan gambar aktivitas nasabah ketika menggunakan layanan digital, misalnya melalui ATM, *mobile banking*, atau aplikasi pembayaran. Menyimpan dokumentasi terkait sistem informasi yang digunakan, seperti *Core Banking System* (CBS) dan fitur-fitur digital lainnya. Mencatat tahapan pengembangan produk dan layanan baru yang berbasis teknologi, serta dokumentasi terkait uji coba atau peluncuran produk.

5. Menggunakan Member *Check*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data disebut *member check*. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh peneliti sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penyedia data (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, apabila data yang ditemukan peneliti disepakati oleh pemberi data, yaitu pegawai dan nasabah BPRS di Sumatera Utara, maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan antara data

yang diperoleh peneliti dengan informasi yang diberikan, peneliti perlu melakukan modifikasi dan penyesuaian hingga tercapai keselarasan antara hasil temuan dan data dari penyedia informasi.

6. Pengecekan anggota

Mengajukan kembali temuan-temuan penelitian, para informan dapat bertindak sebagai juri atau pengambil keputusan yang menilai temuan-temuan tersebut dalam suatu peninjauan, baik secara eksklusif atau seluruhnya. Temuan dalam penelitian perlu diajukan untuk dikonfirmasi kembali dengan para informan yang terlibat dalam penelitian, meliputi pegawai dan nasabah BPRS di Sumatera Utara.

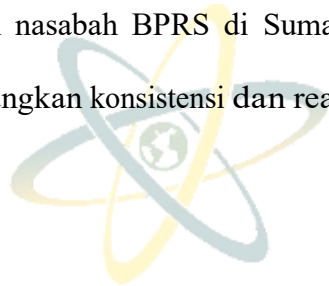
7. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada keadaan yang berbeda. Laporan hasil penelitian sebisa mungkin memberikan uraian yang disusun dengan cermat. Keteralihan bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks pengiriman dan konteks penerima. Peneliti berupaya melihat adanya kemungkinan hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain terkait observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan, meliputi pegawai dan nasabah BPRS di Sumatera Utara.

8. Ketergantungan

Memenuhi ketentuan pedoman yang tepat, peneliti berupaya untuk dapat bersikap konsisten dalam keseluruhan proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian dinilai dengan memusatkan perhatian pada data yang diperoleh

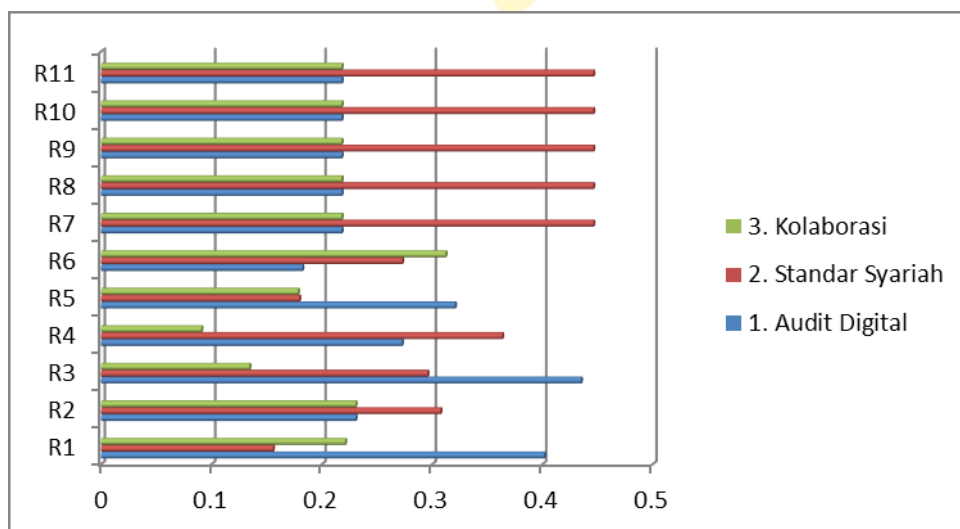
dengan tetap memperhatikan konsistensi yang ada dan kualitas yang teguh (Lexy, 2000). Peneliti berupaya konsisten dalam melakukan penelitian yang focus pada tahapan orientasi atau tahap pengenalan, fase kerja (*working*) dan fase terminasi (akhir pertemuan) dalam Pemanfaatan Teknologi Sebagai Alat Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara Di Era Digital. Seluruh hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan, meliputi pegawai dan nasabah BPRS di Sumatera Utara ditinjau ulang dengan mempertimbangkan konsistensi dan reabilitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

kejahatan siber. Keamanan sistem digital menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan layanan perbankan berbasis teknologi.

Sementara itu, panduan standar syariah memiliki bobot prioritas 0.443, menandakan bahwa meskipun penting, penyusunan regulasi khusus yang mengatur penerapan teknologi digital dalam perbankan syariah masih memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan dua solusi lainnya. Namun, standar ini tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap layanan dan sistem digital yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun angka/nilai *rather agreement*/ angka kesepakatan seluruh responden yaitu 78% kuat atau strong Grafik 1,9 berikut di bawah ini



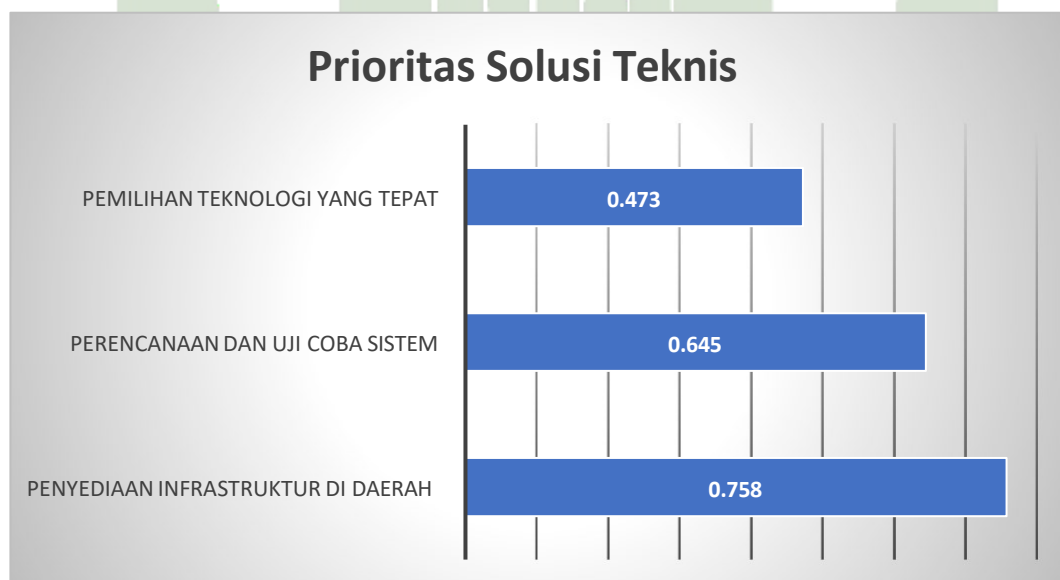
Grafik 1.9 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Regulasi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Grafik 1.9 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 11 (Responden) orang responden, 6 (Enam) orang responden menjawab bahwa Solusi Regulasi yang paling prioritas dalam menentukan Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara adalah Standar Syariah Syariah,

kemudian 4 (Empat) orang menjawab Solusi Regulasi yang paling prioritas adalah Audit Internal dan 1 (satu) orang menjawab Solusi Regulasi yang paling prioritas adalah Kolaborasi, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh kuat, yaitu sebesar 78%

a) Solusi Teknis

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi teknis untuk menentukan strategi peningkatan infrastruktur dan sistem teknologi dalam mendukung transformasi digital BPRS di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Software Super Decision, diperoleh bahwa prioritas solusi teknis menurut pendapat seluruh informan mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, penyederhanaan integrasi sistem perbankan digital, serta penguatan dukungan teknologi melalui investasi dan kerja sama dengan penyedia layanan fintech, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



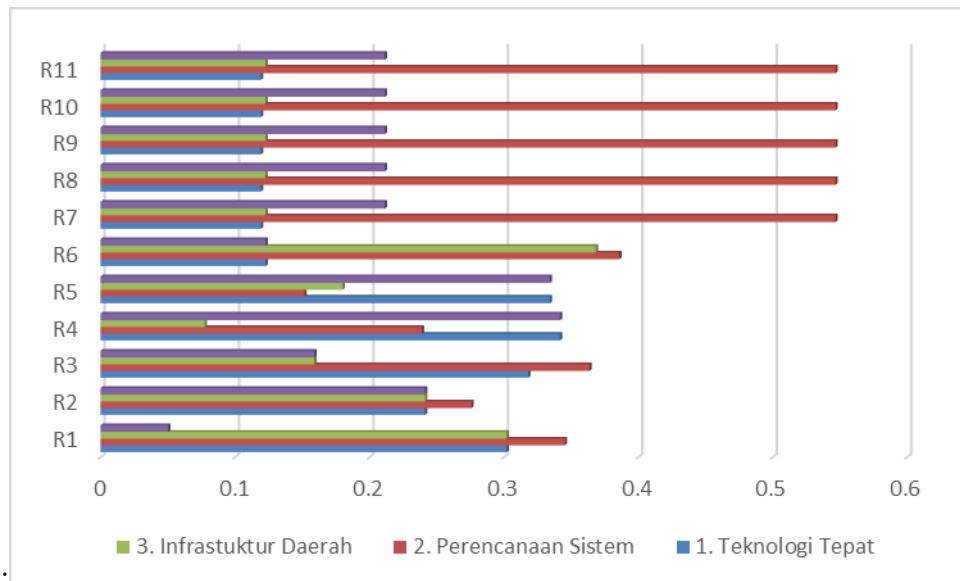
Gambar 4.8 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Teknis

Grafik di atas menunjukkan prioritas solusi teknis dalam mendukung transformasi digital BPRS, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ANP dalam Software Super Decision. Grafik ini menggambarkan tiga solusi utama dalam aspek teknis, yaitu penyediaan infrastruktur di daerah, perencanaan dan uji coba sistem, serta pemilihan teknologi yang tepat, dengan bobot prioritas yang berbeda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur di daerah memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0.758, yang berarti bahwa penguatan infrastruktur teknologi menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan digitalisasi BPRS. Infrastruktur yang mencakup ketersediaan jaringan internet yang stabil, sistem teknologi yang memadai, serta perangkat keras dan lunak yang sesuai sangat diperlukan, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi.

Selain itu, perencanaan dan uji coba sistem memiliki bobot prioritas 0.645, yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi harus dilakukan secara bertahap dan melalui pengujian yang matang untuk menghindari gangguan operasional. Pengujian sistem akan membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan kesiapan teknologi sebelum diterapkan secara luas di BPRS. Sementara itu, pemilihan teknologi yang tepat memiliki bobot prioritas 0.473, yang meskipun lebih rendah dibandingkan dua solusi lainnya, tetap menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi BPRS. Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan BPRS, kepatuhan terhadap regulasi syariah, serta kemudahan dalam proses integrasi dengan sistem yang sudah ada. Adapun angka/nilai *rather agreement*/ angka kesepakatan seluruh

respondent yaitu 60% kuat atau strong Grafik 2,0 berikut di bawah ini



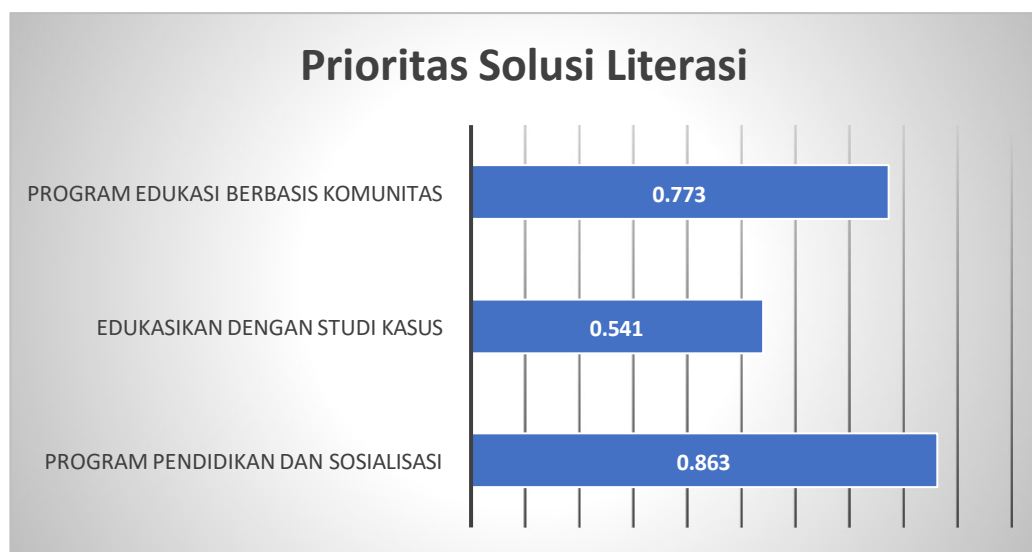
Grafik 2.0 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Teknis Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Grafik 2.0 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 11 (Responden) orang responden, 7 (Tujuh) orang responden menjawab bahwa Solusi Teknis yang paling prioritas dalam menentukan Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara adalah Perencanaan Sistem, kemudian 3 (Tiga) orang menjawab Solusi Teknis yang paling prioritas adalah Teknologi Tepat dan 1 (satu) orang menjawab Solusi Teknis yang paling prioritas adalah Solusi Infrastruktur Daerah, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh kuat, yaitu sebesar 60%

b) Solusi Literasi

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi literasi untuk menentukan strategi peningkatan infrastruktur dan sistem teknologi

dalam mendukung transformasi digital BPRS di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Software Super Decision, diperoleh bahwa prioritas solusi teknis menurut pendapat seluruh informan mencakup peningkatan Program Pendidikan dan Sosialisasi, Edukasikan dengan Studi Kasus serta Program Edukasi Berbasis Komunitas. sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



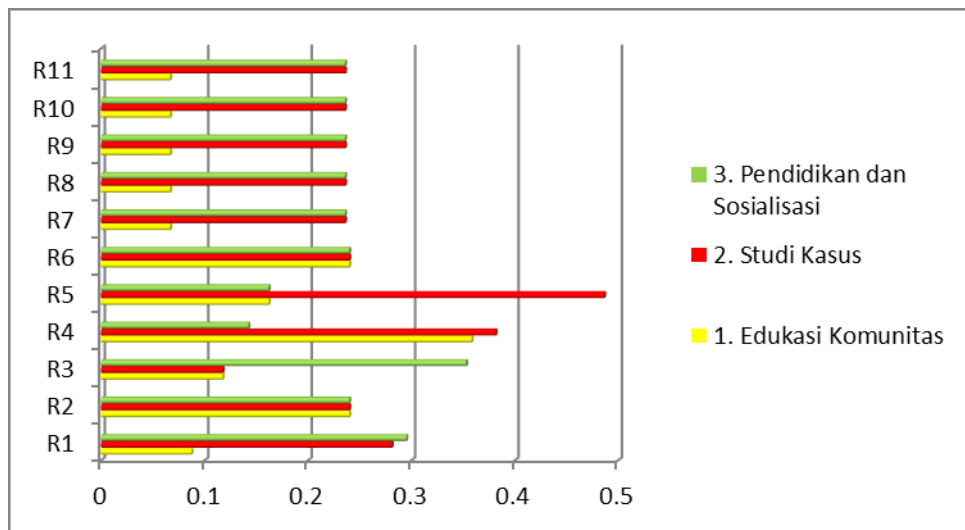
Gambar 4.9 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Literasi

Grafik di atas menunjukkan prioritas solusi literasi dalam mendukung transformasi digital BPRS, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ANP dalam Software Super Decision. Grafik ini menggambarkan tiga solusi utama dalam aspek literasi digital, yaitu program pendidikan dan sosialisasi, edukasi dengan studi kasus, serta program edukasi berbasis komunitas, dengan bobot prioritas yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pendidikan dan sosialisasi memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0.863, yang berarti bahwa peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan sosialisasi merupakan strategi utama dalam mempercepat adopsi teknologi digital di BPRS. Program ini

dapat mencakup seminar, pelatihan digital, serta kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah dan pegawai mengenai layanan digital perbankan syariah.

Selain itu, program edukasi berbasis komunitas memiliki bobot prioritas 0.773, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Program ini dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat, komunitas bisnis, atau organisasi keagamaan untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai layanan digital BPRS. Sementara itu, edukasi dengan studi kasus memiliki bobot prioritas 0.541, yang menandakan bahwa pembelajaran melalui contoh nyata dari nasabah atau lembaga yang telah sukses mengadopsi digitalisasi dapat membantu mempercepat pemahaman dan penerimaan teknologi oleh masyarakat. Studi kasus dapat memberikan gambaran konkret tentang manfaat digitalisasi dalam perbankan syariah, sehingga nasabah lebih mudah memahami dan mengadopsi teknologi tersebut dalam transaksi keuangan mereka. Adapun angka/nilai *rather agreement*/ angka kesepakatan seluruh respondent yaitu 90% kuat atau strong Grafik 2,1 berikut di bawah ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



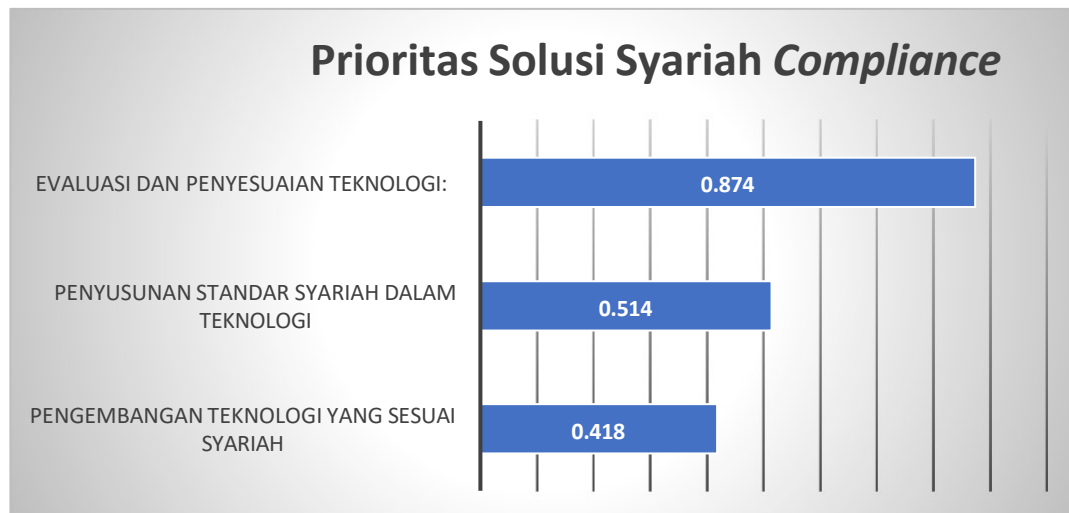
Grafik 2.1 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Literasi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Grafik 2.1 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 11 (Responden) orang responden, 4 (Empat) orang responden menjawab bahwa Solusi Literasi yang paling prioritas dalam menentukan Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara adalah Studi Kasus, kemudian 4 (Empat) orang menjawab Solusi Literasi yang paling prioritas adalah Pendidikan dan Sosialisasi dan 3 (Tiga) orang menjawab Solusi Literasi yang paling prioritas adalah Solusi Edukasi Komunikasi, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh kuat, yaitu sebesar 90%

c) Solusi Syariah Compliance

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi literasi untuk menentukan strategi peningkatan infrastruktur dan sistem teknologi dalam mendukung transformasi digital BPRS di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Software Super Decision, diperoleh bahwa prioritas

solusi teknis menurut pendapat seluruh informan mencakup Teknologi berbasis syariah, Penyusunan standar teknologi syariah, Evaluasi dan Penyesuaian Teknologi. sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.10 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Syariah *Compliance*

Grafik di atas menunjukkan prioritas solusi Syariah *Compliance* dalam mendukung transformasi digital BPRS, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ANP dalam Software Super Decision. Grafik ini menggambarkan tiga solusi utama dalam aspek kepatuhan syariah, yaitu evaluasi dan penyesuaian teknologi, penyusunan standar syariah dalam teknologi, serta pengembangan teknologi yang sesuai syariah, dengan bobot prioritas yang berbeda.

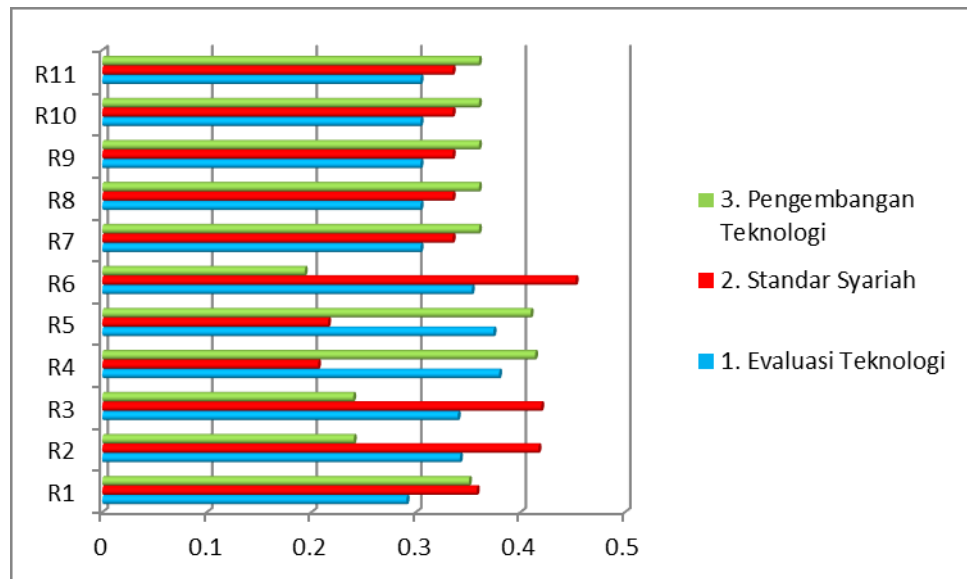
Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi dan penyesuaian teknologi memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0.874, yang berarti bahwa pemantauan dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem teknologi menjadi langkah paling krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses evaluasi ini mencakup audit berkala terhadap layanan digital BPRS, penyesuaian fitur teknologi agar sesuai dengan fatwa dan regulasi syariah, serta peningkatan kualitas layanan

berbasis syariah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.

Selain itu, penyusunan standar syariah dalam teknologi memiliki bobot prioritas 0.514, yang menunjukkan bahwa adanya regulasi dan panduan yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi dalam perbankan syariah tidak melanggar prinsip Islam. Standar ini akan menjadi pedoman utama bagi BPRS dalam mengembangkan sistem perbankan digital yang transparan, aman, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sementara itu, pengembangan teknologi yang sesuai syariah memiliki bobot prioritas 0.418, yang meskipun lebih rendah dibandingkan dua solusi lainnya, tetap menjadi faktor penting dalam digitalisasi perbankan syariah. Inovasi teknologi yang dirancang khusus sesuai dengan prinsip syariah akan membantu BPRS dalam menghadirkan layanan digital yang aman, efisien, serta mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital BPRS di Sumatera Utara sangat bergantung pada penguatan SDM, regulasi yang jelas, pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam setiap aspek agar digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta tetap sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Dengan menerapkan solusi yang telah diidentifikasi berdasarkan prioritasnya, BPRS dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatkan daya saingnya di industri keuangan syariah. Adapun angka/nilai *rather agreement*/ angka kesepakatan seluruh respondent yaitu 51% sedang atau moderate. Grafik 2,2 berikut di

bawah ini

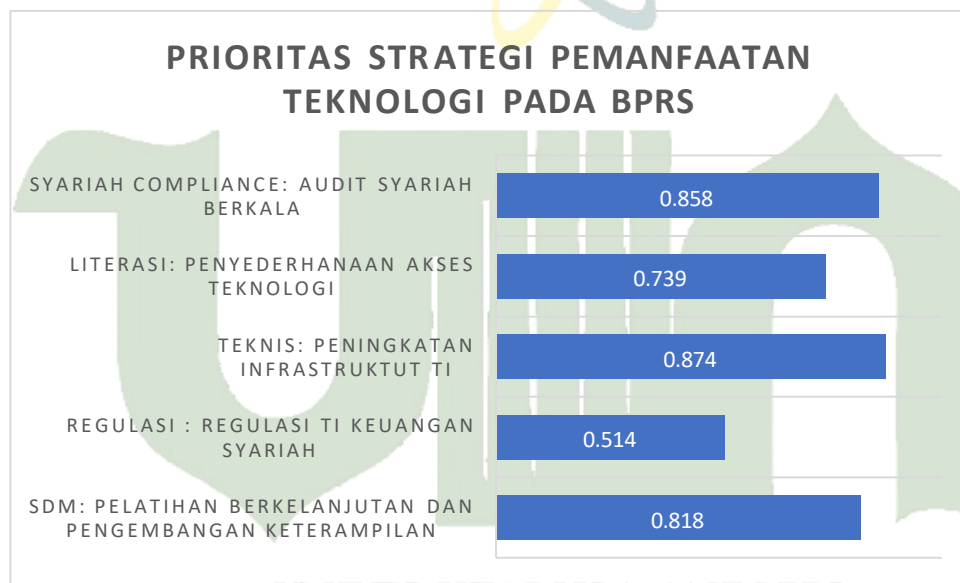


Grafik 2.2 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Syariah Compliance Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Grafik 2.2 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 11 (Responden) orang responden, 4 (Empat) orang responden menjawab bahwa Solusi Syariah Compliance yang paling prioritas dalam menentukan Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara adalah Standar Syariah, kemudian 4 (Empat) orang menjawab Solusi Syariah Compliance yang paling prioritas adalah Pengembangan Teknologi dan 3 (Tiga) orang menjawab Solusi yang paling prioritas adalah Solusi Evaluasi Teknologi, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh Moderate atau Sedang, yaitu sebesar 51%

3. Analisis Strategi

Dalam menghadapi tantangan transformasi digital, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Utara perlu menerapkan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai alat pengembangan. Analisis strategi ini dilakukan melalui lima klaster utama, yaitu penguatan SDM, regulasi yang jelas, pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berikut ini prioritas strategi pada Pemanfaatan Teknologi Sebagai Alat Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara Di Era Digital:



Gambar 4.11 Hasil Sintesis Prioritas Strategi

Grafik di atas menunjukkan prioritas strategi pemanfaatan teknologi pada BPRS, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ANP dalam Software Super Decision. Grafik ini menggambarkan lima strategi utama dalam mendukung transformasi digital BPRS, yaitu penguatan SDM, regulasi keuangan

syariah, pengembangan infrastruktur teknologi, penyederhanaan akses teknologi, dan audit syariah berkala, dengan bobot prioritas yang berbeda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0.874, yang menandakan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi teknologi di BPRS. Hal ini mencakup penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang kompatibel, serta sistem keamanan data yang lebih baik untuk mendukung layanan perbankan digital.

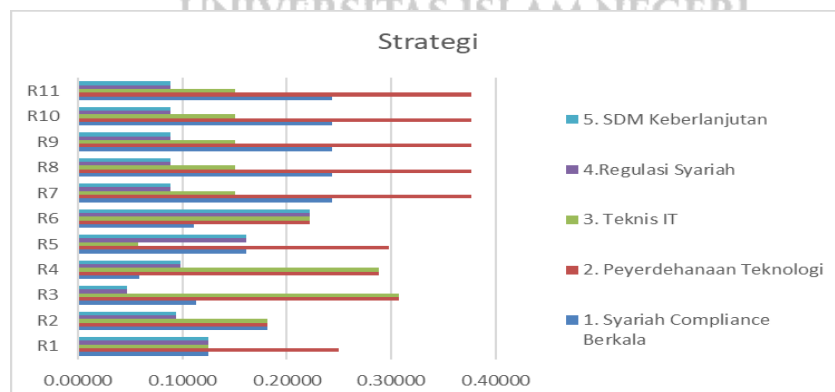
Selain itu, audit syariah berkala memiliki bobot prioritas 0.858, yang menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan berkala terhadap kepatuhan syariah dalam pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem digital yang digunakan oleh BPRS tetap sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, serta transaksi yang tidak transparan. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan SDM memiliki bobot prioritas 0.818, yang berarti bahwa kapasitas pegawai dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital harus terus ditingkatkan. Dengan pelatihan yang terstruktur, pegawai dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan digitalisasi serta dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah.

Sementara itu, penyederhanaan akses teknologi memiliki bobot prioritas 0.739, menandakan bahwa kemudahan dalam mengakses layanan digital sangat penting untuk meningkatkan adopsi teknologi oleh nasabah BPRS. Penyederhanaan ini dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi perbankan

yang lebih user-friendly, peningkatan literasi digital bagi nasabah, serta perluasan jangkauan layanan ke daerah yang masih minim akses teknologi.

Terakhir, regulasi keuangan syariah memiliki bobot prioritas 0.514, yang meskipun memiliki bobot lebih rendah dibandingkan strategi lainnya, tetap menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan transformasi digital BPRS. Regulasi yang jelas dan terarah akan memberikan kepastian hukum serta mendukung pengembangan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan hasil ini, strategi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan BPRS di Sumatera Utara harus difokuskan pada penguatan infrastruktur TI, peningkatan kepatuhan syariah melalui audit berkala, pengembangan SDM yang kompeten, penyederhanaan akses teknologi bagi nasabah, serta perumusan regulasi keuangan syariah yang lebih jelas. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital yang lebih efektif, efisien, dan tetap berlandaskan prinsip perbankan syariah. Adapun angka/nilai rather agreement/ angka kesepakatan seluruh respondent yaitu 76% strong atau kuat Grafik 2,3 berikut di bawah ini



Grafik 2.4 Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Grafik 2.4 di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 11 (Responden) orang responden, 8 (Delapan) orang responden menjawab bahwa Strategi yang paling prioritas dalam menentukan Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara adalah Peyerdehanan Teknologi, kemudian dan 3 (Tiga) orang menjawab Strategi yang paling prioritas adalah SDM Keberlanjutan, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh kuat , yaitu sebesar 76%

4. Nilai rata-rata (*geometric mean*)

Mengacu pada metodologi yang digunakan, yaitu *Analytic Network Process* (ANP) untuk melihat skala prioritas menurut kalangan pakar, akademisi dan praktisi penguatan kompetensi pegawai dalam mendukung transformasi digital BPRS di Sumatera Utara yang menjadi Informan pada penelitian ini, maka hasil skala prioritas dan rata-rata (*geometric mean*) dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.3: Dekomposisi Cluster Masalah

No	Cluster Masalah		Praktisi	Regulator	Akademisi	G-Mean
1	SDM		0,750	0,720	0,740	0,737
2	Regulasi		0,600	0,640	0,620	0,620
3	Teknis		0,800	0,780	0,790	0,790
4	Literasi		0,700	0,690	0,680	0,690
5	Syariah Compliance		0,650	0,660	0,670	0,660
No	Sub Masalah		Praktisi	Regulator	Akademisi	G-Mean
1	SDM	Keterbatasan keterampilan dan kompetensi SDM	0,780	0,750	0,770	0,767
		Kurangnya program pelatihan yang terstruktur	0,550	0,570	0,560	0,560
		Tingkat rotasi pegawai yang tinggi	0,680	0,660	0,670	0,670
2	Regulasi	Ketidakpastian regulasi terkait digitalisasi perbankan syariah	0,630	0,650	0,640	0,640
		Kurangnya regulasi khusus untuk teknologi keuangan syariah	0,520	0,550	0,540	0,537
		Keterbatasan perlindungan data dan keamanan transaksi	0,580	0,590	0,570	0,580
3	Teknis	Infrastruktur teknologi yang belum memadai	0,810	0,790	0,800	0,800
		Integrasi teknologi yang rumit	0,650	0,620	0,630	0,633
		Kurangnya dukungan teknologi yang tepat	0,500	0,520	0,510	0,510
4	Literasi	Rendahnya literasi digital di kalangan nasabah	0,790	0,760	0,780	0,777
		Ketidaktahuan tentang keuntungan digitalisasi	0,670	0,650	0,660	0,660
		Pendidikan dan sosialisasi yang terbatas	0,600	0,620	0,610	0,610
5	Syariah Compliance	Kepatuhan syariah dalam teknologi yang digunakan	0,750	0,720	0,730	0,733
		Pengawasan syariah yang tidak memadai	0,680	0,700	0,690	0,690
		Ketidaksesuaian platform teknologi dengan prinsip syariah	0,620	0,600	0,610	0,610

Tabel 4.4: Dekomposisi Cluster Solusi

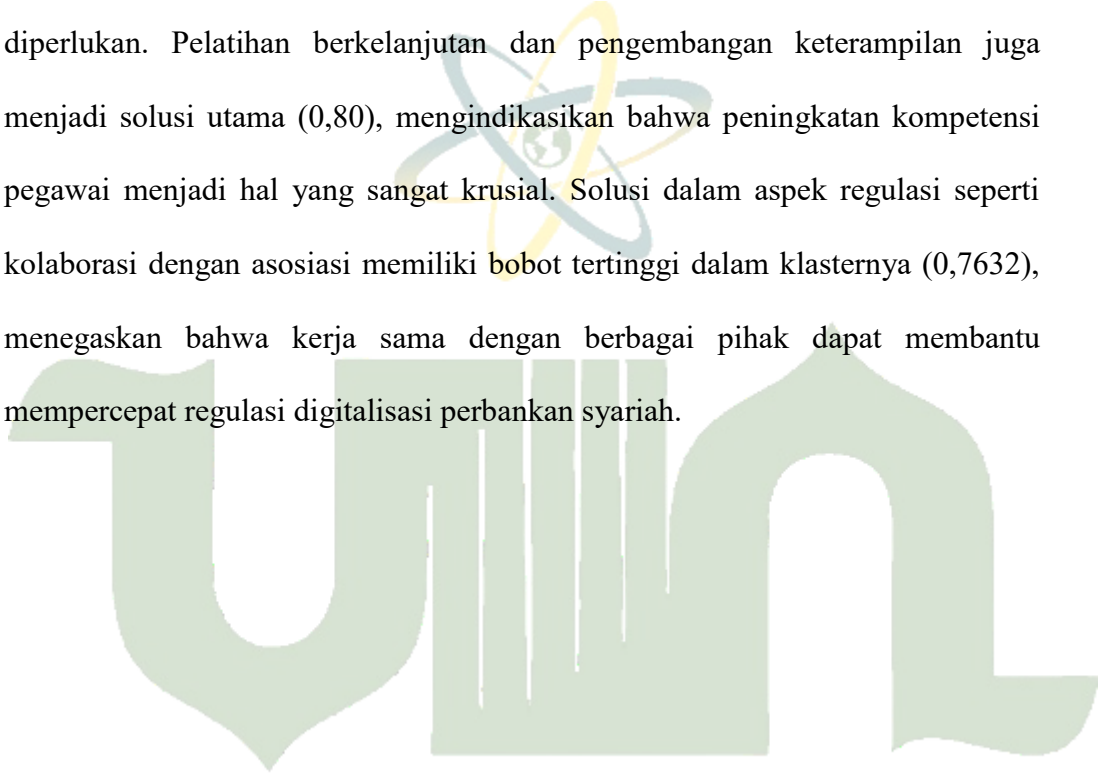
No	Cluster Solusi		Praktisi	Regulator	Akademisi	G-Mean
1	SDM		0,78	0,76	0,77	0,77
2	Regulasi		0,7	0,69	0,71	0,7
3	Teknis		0,8	0,79	0,78	0,79
4	Literasi		0,72	0,71	0,7	0,71
5	Syariah Compliance		0,68	0,67	0,69	0,68
No	Sub Solusi		Praktisi	Regulator	Akademisi	G-Mean
1	SDM	Program pelatihan intensif berbasis teknologi digital perbankan syariah	0,800	0,780	0,790	0,790
		Rekrutmen SDM dengan latar belakang teknologi informasi dan keuangan syariah	0,720	0,700	0,710	0,710
		Skema retensi karyawan berbasis kinerja dan insentif	0,670	0,650	0,660	0,660
2	Regulasi	Penyusunan regulasi khusus digitalisasi BPRS oleh OJK dan DSN-MUI	0,740	0,760	0,750	0,750
		Regulasi perlindungan data dan keamanan transaksi perbankan syariah	0,710	0,690	0,700	0,700
		Penyusunan standar operasional digitalisasi yang sesuai syariah	0,680	0,660	0,670	0,670
3	Teknis	Peningkatan infrastruktur TI di seluruh cabang BPRS	0,820	0,800	0,810	0,810
		Implementasi sistem core banking terintegrasi	0,750	0,730	0,740	0,740
		Kemitraan strategis dengan penyedia teknologi syariah	0,700	0,680	0,690	0,690
4	Literasi	Edukasi digital kepada nasabah melalui pelatihan dan media sosial	0,780	0,760	0,770	0,770
		Program literasi keuangan syariah berbasis teknologi	0,730	0,710	0,720	0,720

		Kampanye publikasi manfaat layanan digital BPRS	0,690	0,670	0,680	0,680
5	Syariah Compliance	Audit teknologi digital secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah	0,770	0,750	0,760	0,760
		Integrasi fatwa DSN-MUI dalam sistem digital	0,720	0,700	0,710	0,710
		Pengembangan platform yang mengakomodasi prinsip maqasid syariah	0,690	0,670	0,680	0,680

Tabel 4.3 menunjukkan nilai bobot rata-rata berdasarkan evaluasi dari praktisi, regulator, dan akademisi terhadap berbagai aspek masalah yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital di BPRS. Aspek teknis memiliki nilai rata-rata tertinggi (0,79), menandakan bahwa infrastruktur dan sistem teknologi yang belum memadai merupakan hambatan utama dalam transformasi digital. Aspek SDM juga memiliki bobot tinggi (0,737), mengindikasikan bahwa keterbatasan keterampilan pegawai menjadi tantangan signifikan. Masalah dalam aspek regulasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan aspek teknis dan SDM (0,620), mengindikasikan bahwa ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan namun bukan yang utama. Sementara itu, aspek literasi dan kepatuhan syariah memiliki bobot sekitar 0,69 dan 0,66, yang menunjukkan bahwa edukasi dan penerapan prinsip syariah dalam teknologi juga menjadi perhatian penting tetapi tidak sebesar aspek teknis dan SDM.

Tabel 4.4 menampilkan prioritas solusi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan yang ada. Solusi teknis memiliki nilai tertinggi (0,8332), menandakan bahwa peningkatan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mendukung

transformasi digital BPRS. Solusi SDM juga memiliki bobot tinggi (0,77), menegaskan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai dalam menghadapi era digital. Dari segi solusi spesifik, penyediaan infrastruktur di daerah memiliki bobot tertinggi (0,8332), yang menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan internet dan sistem teknologi yang lebih baik sangat diperlukan. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan juga menjadi solusi utama (0,80), mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi pegawai menjadi hal yang sangat krusial. Solusi dalam aspek regulasi seperti kolaborasi dengan asosiasi memiliki bobot tertinggi dalam klasternya (0,7632), menegaskan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak dapat membantu mempercepat regulasi digitalisasi perbankan syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN